



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**



**LAPORAN KINERJA TAHUN 2023**



**KANTOR MENUR**

Jl. Menur Pumpungan No. 32 Surabaya  
Telp. (031) 594 7830



**KANTOR JAGIR**

Jl. Jagir Wonokromo No. 350 Surabaya  
Telp. (031) 849 99415

# LAPORAN KINERJA

DINAS PERPUSTKAAN DAN KEARSIPAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2023

## DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Ikhtisar Eksekutif.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi.....	1
B. Isu Strategis.....	3
C. Cascading Kinerja.....	3
D. Peta Proses Bisnis.....	5
E. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi .....	6
F. Sistematika Laporan .....	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>7</b>
A. Rencana Strategis .....	7
B. Perjanjian Kinerja.....	9
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>11</b>
A. Capaian Kinerja Tahun 2023 .....	11
B. Realisasi Anggaran.....	27
C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi .....	27
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>29</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	
Perjanjian Kerja Tahun 2023 (Murni dan Perubahan)	

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Anugrah dan HidayahNya kepada kita semua sehingga Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur 2023 telah diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Satuan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan atau sasaran strategisnya. Dengan adanya Laporan Kinerja Tahun 2023, diharapkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dapat menjadi Instansi Pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat menyelenggarakan tugas, pokok dan fungsinya secara efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta alat kendali bagi peningkatan kinerja. Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun ada indikator belum menunjukkan capaian sesuai target, karena dalam pencapaian organisasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif semua pihak. Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

Tidak lupa kepada seluruh rekan-rekan yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, disampaikan terima kasih. Semoga segala sumbangsih pemikiran dan amal bakti yang telah diberikan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas lembaga senantiasa mendapatkan limpahan Rahmat Allah SWT. Aamiin.

Surabaya, 26 Januari 2024

KEPALA DINAS  
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
PROVINSI JAWA TIMUR



**IRATAY S. SUWARDI, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670402 199403 2 007

# EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

## **A. Mekanisme Penyusunan**

Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur 2023 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **B. Mekanisme Pengukuran**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 telah menetapkan 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis, Kedua sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 2 (dua) indikator kinerja yang capaian kinerjanya rata-rata 111,49% yaitu :

1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Jawa Timur, dengan capaian 102,61 % melampaui target
2. Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip, dengan capaian 120,38 % melampaui target

## **C. Ringkasan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur**

Ikhtisar pencapaian sasaran tahun 2023 sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur yang mendukung kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kebijakan strategis Pemerintah Pusat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur didukung program/kegiatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
2. Program Pembinaan Perpustakaan
3. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
4. Program Pengelolaan Arsip
5. Program Perlindungan, Penyelamatan Arsip
6. Program Perizinan Pengguna Arsip

Manfaat Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur (LKjIP) Tahun 2023 untuk:

- Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang berilmu, cerdas, kreatif dan bertanggungjawab serta ikut mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional, sedangkan Kearsipan sebagai penyelenggaraan kearsipan mampu mewujudkan terciptanya dan tersedianya arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah, mewujudkan pengelolaan arsip yang handal, tertib arsip, keselamatan aset dan perlindungan bahan pertanggungjawaban Pemerintah dan perlindungan hak-hak perdataan masyarakat.

Dengan alasan tersebut, maka Perpustakaan dan Kearsipan harus ada dan dapat menjadi pendukung dan pendorong dalam reformasi birokrasi yang mampu memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, dan ikut mewujudkan negara dan pemerintah yang memenuhi karakteristik *Good Governance*.

Mengingat pentingnya peran Perpustakaan dan Kearsipan, dalam mewujudkan Visi Provinsi Jawa Timur yaitu “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintah yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan semangat Gotong Royong” maka di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 yang akan diwujudkan melalui 4 misi, perpustakaan dan kearsipan masuk dalam misi ke-2 Terciptanya Kesejahteraan yang berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Pekerjaan dengan Memperhatikan Kelompok Rentan dan Misi 3: Tata kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Parsipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.

#### **A. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI**

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memberikan tugas kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 72 tahun 2023 tentang



Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang perpustakaan dan kearsipan serta tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang perpustakaan dan kearsipan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka menajalankan tugas dan Fungsi tersebut melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 5 (lima) bidang terdiri dari 3 (tiga) bidang perpustakaan dan 2 (dua) bidang Kearsipan dengan Jabatan Fungsional Pustakawan dan Fungsional Arsiparis, selanjutnya tergambar sebagaimana bagan di bawah ini:



## **B. ISU-ISU STRATEGIS**

Isu-isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa mendatang. Apabila kondisi yang menjadi isu strategis tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang besar dan menghilangkan peluang bagi peningkatan layanan kepada masyarakat.

Berdasarkan gambaran umum kondisi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dan telaah sasaran jangka menengah pada Renstra Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Arsip Nasional Republik Indonesia, terdapat beberapa isu-isu strategis yang tertuang dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2024 yang dapat dirangkum sebagai berikut :

Isu strategis Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2024, adalah sebagai berikut:

### **a. Urusan Perpustakaan**

- Pergeseran preferensi masyarakat terhadap media digital daripada sumber informasi fisik;
- Masih rendahnya budaya literasi, kreatifitas dan inovasi;
- Perkembangan teknologi digitalisasi perpustakaan;
- Tenaga perpustakaan yang mempunyai sertifikasi masih sangat sedikit;
- Adanya kesenjangan akses perpustakaan antara perkotaan dan pedesaan.

### **b. Urusan Kearsipan**

- Implementasi SRIKANDI, Digitalisasi Arsip, Penyelamatan Arsip Statis, Arsip Terjaga dan Arsip Aset;
- Memori Kolektif Bangsa dan Memory of the World;
- Penguatan Lembaga Kearsipan Provinsi;
- Penyelamatan Arsip Covid-19.

## **C. CASCADING KINERJA (Keterhubungan dengan RPJMD)**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur. Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur, adalah sebagai berikut:

**VISI:**

Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dan semangat gotong royong.

**MISI:**

1. Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor dan keterhubungan wilayah
2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partispatoris, memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan
4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasn Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya

Memperhatikan Visi dan Misi diatas, maka terkait dengan tugas dan fungsi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur mendukung tugas-tugas dalam pencapaian Misi 3 Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud, yaitu:

**MISI 3 :** Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partispatoris, memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan

Selain Keterhubungan RPJMD, Tupoksi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dalam Program dan Kegiatan lima tahun dilakukan dengan orientasi mendukung Nawa Bhakti satya, antara lain dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

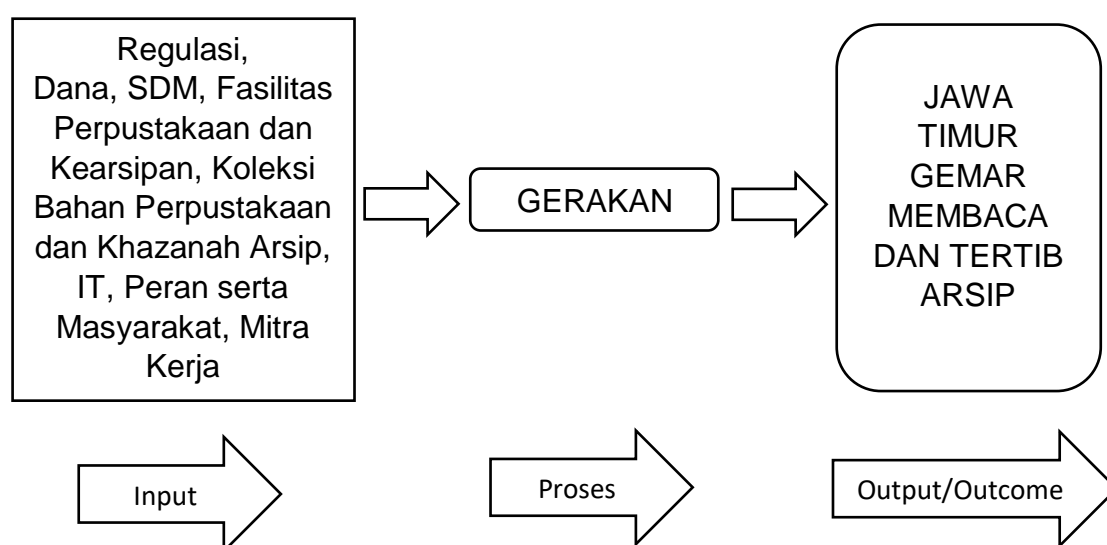
**Integrasi Nawa Bhakti Satya dengan Program Perangkat Daerah**

<b>NAWA BHAKTI</b>	<b>PROGRAM ICON</b>	<b>PROGRAM NOMENKLATUR</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>
1. BHAKTI - 8 : JATIM AMANA Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	PENGAWASAN	Program perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah

			Provinsi Jawa Timur
2. BHAKTI – 9 : JATIM HARMONI Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup	INTEGRASI PERPUSDA – MUSEUM GALERI SENI	– Program Pengembangan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan – Program Perlindungan, Penyelamatan, Pengolahan dan Pendayagunaan Kearsipan	– Alih Media Buku Kuno dan Naskah Kuno – Galeri Majapahit dan Wali Limo – Wisata Arsip Anak Sekolah (WARAS)

#### D. PETA PROSES BISNIS

Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah. Peta proses bisnis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:



## **E. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI**

Laporan hasil evaluasi Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 memperoleh nilai 88,14 atau predikat A yang berarti bahwa tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang beorientasi pada hasil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur menunjukkan hasil yang memuaskan. Namun demikian banyak hal yang harus ditingkatkan diantaranya :

- Dalam penyusunan dokumen perencanaan melengkapi dengan penjelasan atau definisi operasional pada indikator yang digunakan dan formulasi perhitungan pada Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Penyusunan Lakip dalam penyajian kinerjanya dan sistematikanya menyesuaikan dengan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014

Adapun rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan manajemen kinerja adalah sebagai berikut :

- Pengembangan SDM yang menangani akuntabilitas kinerja baik dari segi kualitas dan kuantitas;
- Peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dilengkapi dengan definisi operasional terkait strategi dan upaya mencapai target serta formulasi perhitungan realisasi capaian kinerja;
- Kepala Perangkat Daerah memastikan agar setiap jenjang jabatan dilakukan monitoring capaian kinerja sebagai dasar pemberian reward dan punishment;
- Memanfaatkan pengembangan teknologi informasi untuk evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

## **F. SISTEMATIKA LAPORAN**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur tahun 2023 adalah sebagai berikut :

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi organisasi dan peran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis, dan rencana kerja serta anggaran dan menguraikan pengukuran kinerja organisasi

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada bab ini disajikan data serta analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2023, serta realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian kinerja

### **Bab IV Penutup**

Berisi kesimpulan dan pencapaian kinerja, kendala dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya

### **Lampiran**

Terlampir data-data yang diperlukan

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **A. RENCANA STRATEGIS**

Penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dilakukan dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024.

Gubernur yang daerahnya memiliki periode RPJMD berakhir Tahun 2024, untuk menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2025-2026.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2026 merupakan dokumen penjabaran Perencanaan Pembangunan dalam kurun waktu dua tahun (2025-2026) dan sebagai bagian penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026.

Renstra Perangkat Daerah menjabarkan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah selama 2 (dua) tahun (2025-2026) yang terdiri dari: Gambaran pelayanan Perangkat Daerah meliputi pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah, dan kelompok sasaran; Permasalahan dan isu strategis; Tujuan dan Sasaran, Cascading; Strategi dan Arah Kebijakan; Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta Pendanaan; serta Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Berdasarkan analisis dan pendekatan yang telah dilakukan maka ada 2 (dua) tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :



Tujuan 1 :  
Peningkatan Kegemaran Membaca Masyarakat  
Jawa Timur



Tujuan 2 :  
Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Kearsipan di  
Jawa Timur

Untuk mendukung pencapaian tujuan telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan/dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Adapun sasaran yang hendak dicapai, yaitu :



Sasaran 1 :  
Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat  
di Jawa Timur



Sasaran 2 :  
Meningkatnya Tertib Administrasi Kearsipan di  
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Terhadap sasaran strategis diatas ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur yaitu:

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat → Target 15,70

Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip → Target 76%

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam rencana strategis 2021-2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja setiap tahunnya, namun memperhatikan hasil evaluasi dan capaian tahun dari sebelumnya. Dibawah ini merupakan Perjanjian kinerja sebelum mengalami perubahan:

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 (Sebelum Perubahan)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat Jawa Timur	Indeks Pemabangunan Literasi Masyarakat Jawa Timur	15
2	Meningkatnya Sistem Tertib Administrasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip	72%

Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 mengalami 1 (satu) kali perubahan, dimana Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Gubernur Jawa Timur pada bulan Januari 2023, kemudian dilakukan revisi pada bulan Oktober. Adapun yang menyebabkan perlu dilakukan revisi adalah bulan Oktober 2023 dilakukan perubahan anggaran yang harus merubah target yang telah ditetapkan.

Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengatur :

*Perjanjian kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:*

*a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat*



- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan alokasi anggaran) dan,
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran

Dibawah ini perjanjian kinerja tahun 2023 yang mengalami perubahan:

Tabel 2.2  
Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Setelah Perubahan)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat Jawa Timur	Indeks Pemabangunan Literasi Masyarakat Jawa Timur	15,70
2	Meningkatnya Sistem Tertib Administrasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip	76%

Dalam rangka mewujudkan target yang tertuang dalam perjanjian kinerja tersebut ditetapkan anggaran tahun 2023 yang terdiri dari 1 (satu) program penunjang, 2 (dua) urusan perpustakaan dan 3 (tiga) program urusan kearsipan.

NAMA PROGRAM	(Rp) (sebelum perubahan)	(Rp) (Setelah Perubahan)
a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	47.867.332.762,-	50.006.940.003,-
b. Program Pembinaan Perpustakaan	2.987.181.774,-	4.471.261.880,-
c. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	545.254.930,-	635.241.750,-
d. Program Pengelolaan Arsip	1.938.895.034,-	1.493.425.934,-

e. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	282.213.500,-	267.406.200,-
f. Program Perizinan Penggunaan Arsip	111.177.000,-	94.480.400,-
JUMLAH	53.631.995.700,-	56.968.756.167,-

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur tahun 2023 dinyatakan “berhasil” atau capaian rata-ratanya 111,49%.

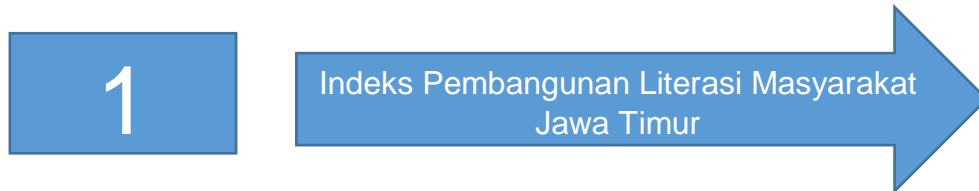
Tabel dibawah ini menampilkan secara keseluruhan hasil capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dari 2 (dua) indikator dan keduanya mencapai 100% lebih.

Tabel 3.1  
Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat Jawa Timur	Indeks Pemabangunan Literasi Masyarakat Jawa Timur	15,70	16,11	102,61
2	Meningkatnya Sistem Tertib Administrasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah	Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip	76%	91,49%	120,38%

	Provinsi Jawa Timur				
--	---------------------	--	--	--	--

Penjelasan lebih rinci pada masing-masing indikator sasaran dan capaian indikator sebagai berikut:



Literasi merupakan faktor esensial dalam upaya membangun fondasi yang kokoh bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter. Literasi tidak hanya membaca, menulis dan berhitung tapi juga bentuk *Cognitive skill* (tercermin pada kemampuan mengidentifikasi, memahami, dan menginterpretasi informasi yang diperoleh) untuk ditransformasikan ke dalam kegiatan-kegiatan produktif yang memberi manfaat sosial, ekonomi, dan kesejahteraan.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat merupakan hasil perhitungan sesuai rumus/formulasinya untuk mengetahui kondisi semua jenis perpustakaan, mulai dari aspek sebaran komponen 1-7 di seluruh wilayah Indonesia. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dijadikan salah satu unsur Indikator Kinerja Kunci di bidang perpustakaan dalam Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dengan bobot 2% sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

Rumus/formulasi perhitungan indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat pada dasarnya terdiri atas 2 (dua) komponen, antara lain : Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) ada 7 unsur dan Aspek Masyarakat (AM) hanya 1 unsur. Berikut rumus pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat:

$$\sum_i \frac{UPLM_i}{AM} \times 100$$

Keterangan :

UPLM  $i$  : Variabel komponen pembentuk indeks dari Unsur Pembangun Literasi Masyarakat

AM : Jumlah populasi sesuai segmentasi berdasarkan lokus/jenis Perpustakaan

Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) terdiri atas 7 (tujuh) komponen yaitu:

– UPLM 1 – *Pemerataan Layanan Perpustakaan*, dihitung dengan formulasi :

$$UPML\ 01 = \sum_i \frac{\text{Jumlah Perpustakaan Wilayah ke } - i}{\text{Jumlah Penduduk Wilayah ke } - i}$$

Jumlah total perpustakaan yang dimaksud terdiri dari:

- a) Perpustakaan Umum, yang meliputi: Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum Provinsi, Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota, Perpustakaan Umum Kecamatan, Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan, Perpustakaan Komunitas, dan Taman Bacaan.
- b) Perpustakaan Khusus, yang meliputi : Perpustakaan khusus milik instansi pemerintah dan Perpustakaan khusus milik swasta.
- c) Perpustakaan Sekolah/Madrasah, yang meliputi : Perpustakaan SD/MI, Perpustakaan SMP/MTS, Perpustakaan SMA/SMK/MA, dan Perpustakaan Pondok Pesantren.
- d) Perpustakaan Perguruan Tinggi.

– UPLM 2 – *Ketercukupan Koleksi Perpustakaan*, dihitung dengan formulasi:

$$UPML\ 02 = \sum_i \frac{\text{Jumlah Koleksi Perpustakaan Wilayah ke } - i}{\text{Jumlah Penduduk Wilayah ke } - i}$$

- a) Jumlah koleksi di perpustakaan umum daerah tingkat kabupaten/kota/provinsi terdiri dari 10 kelas subjek koleksi, diantaranya: Komputer, Informasi dan Karya Umum, Filsafat dan Psikologi, Agama,

Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa, Sains, Teknologi, Kesenian, Sastra, Geografi dan Sejarah.

b) Kondisi ideal adalah jumlah koleksi perpustakaan di suatu wilayah adalah sebanyak 2 kali jumlah penduduk (Sumber: IFLA/UNESCO).

– UPLM 3 – *Ketercukupan Tenaga Pustakawan*, dihitung dengan formulasi:

$$UPML03 = \sum_i \frac{\text{Jumlah Tenaga Perpustakaan Wilayah ke } - i}{\text{Jumlah Penduduk Wilayah ke } - i}$$

a) Tenaga perpustakaan adalah pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.

b) Kondisi ideal adalah jumlah tenaga perpustakaan adalah 1 orang pustakawan per 2.500 penduduk (Sumber: IFLA/UNESCO).

– UPLM 4 – *Tingkat Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan*, dihitung dengan formulasi:

$$UPML04 = \sum_i \frac{\text{Jumlah Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan Wil. ke } - i}{\text{Jumlah Penduduk Wilayah ke } - i}$$

a) Seberapa tinggi pemanfaatan perpustakaan di sebuah wilayah ditunjukkan melalui tingkat kunjungan masyarakat per hari ke perpustakaan.

b) Kondisi ideal adalah minimal 2% dari jumlah penduduk di suatu wilayah mengunjungi perpustakaan setiap harinya.

– UPLM 5 – *Jumlah Perpustakaan Ber-SNP*, dihitung dengan formulasi:

$$UPML05 = \sum_i \frac{\text{Jumlah Total Perpustakaan Ber-SNP Wilayah ke } - i}{\text{Jumlah Penduduk Wilayah ke } - i}$$

SNP adalah Standard Nasional Perpustakaan

- UPLM 6 – *Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan*, dihitung dengan formulasi:

$$= \sum_i \frac{\text{Jumlah Masyarakat yang terlibat Sosialisasi Perpus Wil. ke } - i}{\text{Jumlah Penduduk Wilayah ke } - i}$$

Sosialisasi merupakan program KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) yang dilakukan oleh Perpustakaan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- UPLM 7 – *Anggota Perpustakaan*, dihitung dengan formulasi:

$$\text{UPML 07} = \sum_i \frac{\text{Jumlah Anggota Perpustakaan Wilayah ke } - i}{\text{Jumlah Penduduk Wilayah ke } - i}$$

Seberapa besar sebaran peran perpustakaan di sebuah wilayah ditunjukkan melalui seberapa banyak masyarakat yang menjadi anggota di perpustakaan.

Dibawah ini menyajikan hasil capaian kinerja sasaran strategis dari pernyataan kinerja yang sudah diperjanjikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dengan Gubernur Jawa Timur.

### 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 3.2

#### Pencapaian Kinerja

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat Jawa Timur	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Jawa Timur	15,70	16,11	102,61

Hasil capaian IPLM Provinsi Jawa Timur dikaji dan dilakukan sensus oleh Perpustakaan Nasional RI yang tertuang dalam laporan Kajian IPLM 2023.

**2) Membandingkan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya**

Tabel 3.3  
Perbandingan Pencapaian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja			Ket	
			2021	2022	2023		
					Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat Jawa Timur	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Jawa Timur	14,78	15,69	15,70	16,11	Tahun 2023 capaian melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 102,61%

Indikator IPLM Jawa Timur setiap tahun mengalami kenaikan karena didukung oleh program dan kegiatan/sub kegiatan yang sudah dilakukan.

**3) Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra)**

Data capaian IPLM Tahun 2023 bila dibandingkan dengan target yang terdapat dalam dokumen Perubahan ke-2 Renstra Tahun 2021-2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4  
Indikator Sasaran Tahun 2021-2024 dan Capaian Kinerja

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2020)	Target Kinerja (Dalam Perubahan ke-2 Renstra)				Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	13,5	13,75	14,5	15,70	-	14,78	15,69	16,11	-	14,25

**4) Membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan Standar Nasional**

Tabel 3.5  
Indikator Sasaran Tahun 2023 dan Capaian Kinerja

No	Sasaran	Indikator	Nasional	Jawa Timur	Ket
			Realisasi	Realisasi	
1	Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat Jawa Timur	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Jawa Timur	14,58	16,11	Hasil Realisasi Jawa Timur diatas angka Nasional

**5) Analisis penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja dan permasalahan yang muncul**

Keberhasilan indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat karena adanya kerjasama yang baik dari 3 (tiga) bidang yaitu bidang



Pelayanan Perpustakaan dan Informasi, Bidang Pembinaan Perpustakaan dan Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan yang masing-masing memberikan andil sesuai dengan tugas dan fungsi dari bidang. Dibalik keberhasilan indikator ini ada permasalahan yang harus segera dicarikan solusinya diantaranya:

1. Program Pembinaan Perpustakaan:

- a. Banyaknya permintaan kolaborasi dengan PD/Komunitas terkait masyarakatan gemar membaca berupa Darling dan MPK yang tidak tercover;
- b. Belum dapat memenuhi banyaknya Permintaan Layanan Terpadu Perpustakaan Desa (LPTD)/Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah (LTPS) dan Lapas;
- c. Adanya keluhan dari pemustaka terkait kurang mendukungnya sarana dan prasarana (Wifi, Pencahayaan, Lahan Parkir, dan Ruang Baca kurang luas);
- d. Keterbatasan SDM dalam menangani pendataan di Kab/Kota, sehingga data yang tersedia belum akurat;
- e. Aplikasi pendataan Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) sering error;
- f. Proses pengajuan NPP yang cukup panjang, sehingga membutuhkan waktu yang lama;
- g. Masih rendahnya (belum mencapai 10%) jumlah perpustakaan yang Berstandar Nasional Perpustakaan dibanding dengan jumlah perpustakaan SLTA di Jatim sebanyak 2.244 (terakreditasi);
- h. Masih rendahnya perpustakaan khusus pondok pesantren salafiyah yang belum memiliki perpustakaan kurang lebih 25% dibandingkan dengan jumlah ponpes salafiyah yang terdata (Kanwil Kemenag Jatim) sebanyak 200 lebih;
- i. Bertambahnya jumlah pustakawan hasil penyetaraan, sehingga jumlah pejabat fungsional pustakawan bertambah 115 orang. Sedangkan pejabat fungsional pustakawan hasil penyetaraan yang telah mengikuti diklat pelatihan teknis berjumlah 30 orang atau setara dengan 26%. Sehingga perlu dilakukan pelatihan teknis perpustakaan terhadap pejabat penyetaraan yang belum mengikuti diklat pelatihan teknis;

j. Masih banyak perpustakaan yang belum mengetahui perpustakaan berbasis inklusi sosial, dimana selama ini hanya melekat pada jenis perpustakaan umum yaitu perpustakaan desa karena dianggap sebagai bentuk pemerintahan terkecil dan paling dekat dengan masyarakat.

2. Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno:

- a. Keterlambatan pengadaan koleksi mengakibatkan pengolahannya tertunda ke tahun berikutnya;
- b. Adanya naskah kuno di masyarakat yang belum terdaftar;
- c. Kurang terintegrasinya BD dan KID dari Kab/Kota.

#### **6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Untuk sasaran ke-1 anggaran sejumlah Rp. 17.066.062.658,- terealisasi Rp.16.900.356.747,- atau 99,03% bila dibandingkan dengan capaian kinerjanya 102,61% maka ada efisiensi penggunaan anggaran sebesar 1,03%.

#### **7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Jawa Timur, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan didukung oleh 2 (dua) Program urusan perpustakaan dengan jumlah 6 (enam) kegiatan, 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan dan 1 (satu) program penunjang yang antara lain:

1. Program Penunjang, dengan kegiatan:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2. Program Pembinaan Perpustakaan, dengan kegiatan:
  - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat daerah Provinsi
  - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
- 3. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
  - Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi
  - Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah
  - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi
  - Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Dari masing-masing program memberikan andil yang cukup besar terhadap meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Jawa Timur, dalam penyediaan koleksi program pengembangan dan pelestarian bahan perpustakaan mampu menyediakan koleksi perpustakaan sampai dengan tahun 2023, buku sebanyak 144.053 judul atau 503.542 eksemplar, sedangkan yang berupa non buku sebanyak 11.231 judul atau 50.453 satuan yang terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis. Selanjutnya Program Peningkatan Mutu Layanan Perpustakaan dalam meningkatkan indikator pertama ini berupaya memberikan pelayanan yang baik terhadap pemustaka, dari rekapitulasi aktifitas layanan perpustakaan sepanjang tahun 2023 pemustaka yang memanfaatkan layanan perpustakaan sebanyak 1.007.583 orang dan yang menjadi anggota perpustakaan sebanyak 19.782 orang. Layanan “DARLING” Dongeng Anak dan Remaja Keliling dengan menggunakan mobil dongeng keliling yang pernah mendapatkan penghargaan “Innovative Government Award/IGA” mampu menyelesaikan 56 kali, baik langsung maupun Dongeng Online (DOLEN) melalui zoom/youtube dengan peserta 30.188 anak. Untuk Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) mampu melayani ke 25 titik layanan.

Selain memberikan pelayanan perpustakaan di tempat atau keliling karena pandemi ini berkurang dan lebih banyak pada program memberikan pelayanan pinjam pakai secara paket yang disebut LTPD (Layanan Terpadu Perpustakaan Desa), LTPS (Layanan Terpadu Perpustakaan

Sekolah) dan Layanan LAPAS yang wilayahnya Jawa Timur sebanyak 6 kali. Tingkat kepuasan masyarakat juga telah diukur *Real Time* pada Bulan Januari 2024 dengan hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perpustakaan tahun 2023 sebesar 87,06% dengan kategori tinggi/baik. Berbagai upaya telah dilakukan dan akan terus ditingkatkan, jadi harapan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Jawa Timur kedepan akan terus meningkat dari tahun ke tahun.



## 2 Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip

Berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan yang kemudian ditindaklanjuti, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan. Kedua peraturan tersebut itulah yang menjadi payung hukum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kearsipan baik di Kabupaten/Kota maupun Perangkat Daerah agar tertib Arsip .

Hasil yang sudah dilakukan di tahun 2023 berupa kegiatan evaluasi terhadap kinerja dan sekaligus apresiasi atas kinerja perangkat daerah provinsi bidang kearsipan. Metode yang digunakan melakukan pengawasan terhadap 47 Unit Kearsipan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan peraturan yang ada. Capaian tersebut melampaui target dikarenakan adanya metode yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai dibawah 60 dengan kategori B, diberikan saran dan fasilitasi untuk perbaikan sesuai dengan rekomendasi Tim Audit Kearsipan.

**1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023**

Tabel 3.6  
Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
2	Meningkatnya Sistem Tertib Administrasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip	76%	91,49%	120,38%

**2) Membandingkan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya**

Tabel 3.7  
Perbandingan Pencapaian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja				Ket
			2021	2022	2023		
					Target	Realisasi	
2	Meningkatnya Sistem Tertib Administrasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip	60%	72%	76%	91,49%	Tahun 2023 capaian melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 120,38%

**3) Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra)**

Tabel 3.8

## Indikator Sasaran Tahun 2021-2024 dan Capaian Kinerja

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2020)	Target Kinerja (Dalam Perubahan ke-2 Renstra)				Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip	60%	60%	72%	76%	-	60%	72,34%	91,49%	-	92%

#### 4) Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun 2023 dengan Standar Nasional

Untuk indikator sasaran ke-2 Persentase Perangkat Daerah yang tertib Arsip tidak ada angka nasional karena itu kewenangan provinsi dalam melaksanakan pengawasan kearsipan di wilayahnya.

#### 5) Analisis penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja dan permasalahan yang muncul

Keberhasilan indikator Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip karena adanya kerjasama yang baik dari 2 (dua) bidang urusan kearsipan yaitu bidang Penyelamatan dan Pemanfaatan Arsip Statis dan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Kearsipan yang masing-masing memberikan andil sesuai dengan tugas dan fungsi dari bidang. Dibalik keberhasilan indikator ini ada permasalahan yang harus segera dicarikan solusinya diantaranya:

- Program Pengelolaan Arsip:
  - a. Kurangnya SDM pengelola kearsipan;
  - b. Sarana prasarana seperti Record Center dan Depo Arsip;
  - c. Minimnya arsiparis yang memiliki/mengikuti sertifikasi baik sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis (JFA) maupun sertifikasi profesi/teknis kearsipan;

- d. Minimnya perhatian Perangkat Daerah/Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) terhadap tata kelola Kearsipan;
  - e. Belum semua Perangkat Daerah memiliki arsiparis;
  - f. Belum semua Perangkat Daerah mempunyai record center.
- Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip:
    - a. Kurangnya pemahaman Perangkat Daerah (PD) dalam penyelamatan arsip pada Perangkat Daerah (PD) yang digabung/dibubarkan;
    - b. Minimnya Perangkat Daerah yang menyerahkan arsip statis;
    - c. Minimnya Perangkat Daerah yang melaksanakan pemusnahan arsip;
    - d. Sulitnya mengidentifikasi keberadaan arsip yang dinyatakan hilang;
  - Program Perizinan Penggunaan Arsip:
    - a. Terbatasnya arsip statis yang bersifat tertutup.

#### **6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Untuk sasaran ke-2 anggaran sejumlah Rp. 1.855.312.534,- terealisasi Rp.1.846.592.310,- atau 99,52% bila dibandingkan dengan capaian kinerjanya 120,38% maka ada efisiensi penggunaan anggaran sebesar 1,21%.

#### **7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan didukung oleh 3 (tiga) Program urusan kearsipan dengan jumlah 9 (sembilan) kegiatan, 21 (dua puluh satu) sub kegiatan yang antara lain:

- Program Pengelolaan Arsip
  - a. Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi;
  - b. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi;
  - c. Pengelolaan Simpul Jaringan dan Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi.
- Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

- a. Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun;
- b. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala provinsi;
- c. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi;
- e. Pencarian Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan hilang.
- Program Perizinan Penggunaan Arsip
  - a. Pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di daerah Provinsi

Penjelasan capaian indikator pada sasaran ke 2 Persentase Perangkat Daerah yang tertib arsip pada tahun 2023 ditargetkan 76% dan hasilnya 90,6% atau capaiannya 120,38%. Sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 tahun 2019 pasal 25 memuat nilai dan kategori dalam pengawasan kearsipan serta capaian Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

No	Nilai	Kategori	Jumlah PD
1	90-100	AA (Sangat Memuaskan)	5
2	80-90	A (Memuaskan)	8
3	70-80	BB (Sangat Baik)	17
4	60-70	B (Baik)	13
5	50-60	CC (Cukup)	4
6	30-50	C (Kurang)	-
7	0-30	D (Sangat Kurang)	-
Jumlah			47

Dari 47 (empat puluh tujuh) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dinyatakan sangat memuaskan, memuaskan, sangat baik dan baik ada 43 (empat puluh tiga) Perangkat Daerah. Adapun 13 (tiga belas) Perangkat Daerah terbaik diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (AA/Sangat Memuaskan)



2. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (AA/Sangat Memuaskan)
3. Dinas Kelautan dan Perikanan (AA/Sangat Memuaskan)
4. RSUD Haji (AA/Sangat Memuaskan)
5. Dinas Kesehatan (AA/Sangat Memuaskan)
6. RS Jiwa Menur (A/Memuaskan)
7. RSUD Saiful Anwar (A/Memuaskan)
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (A/Memuaskan)
9. Badan Koordinasi Wilayah III Malang ((A/Memuaskan)
10. RSUD Dr. Soedono (A/Memuaskan)
11. RSUD Dr. Soetomo (A/Memuaskan)
12. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (A/Memuaskan)
13. Badan Pendapatan Daerah (A/Memuaskan)

Adapun hasil diatas belum optimal karena Bidang Kearsipan masih dianggap tidak penting oleh banyak Perangkat Daerah, sehingga banyak arsip Perangkat Daerah yang tidak diperhatikan penanganannya, tidak adanya SDM pengelola arsip di Perangkat Daerah untuk pengelolaan kearsipannya.

Permasalahan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur selaku Instansi Pembina bagi pembinaan pengelolaan kearsipan yang ada di Perangkat Daerah adalah kurangnya jumlah fungsional arsiparis yang dimiliki, sehingga banyak Perangkat Daerah yang sedikit mendapatkan bimbingan secara intensif. Begitu juga Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sedikit sekali yang memiliki fungsional arsiparis. Sarana dan prasarana penyimpanan arsip (depo arsip) belum ada, misalnya ada penyimpanan arsip yang dimiliki namun tidak memenuhi standar.

Solusi dalam rangka mengoptimalkan hasil tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memberikan pembinaan yang terus menerus, sosialisasi dan penilaian bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara lebih intensif;

2. Menambah jumlah SDM fungsional arsiparis baik melalui diklat fungsional arsiparis bagi pegawai maupun melalui penambahan pegawai untuk formasi arsiparis;
3. Membangun Record Center dan Depo Arsip yang sesuai dengan standard.

Sasaran yang ke-2 dengan indikator persentase Perangkat Daerah yang tertib arsip ini hasilnya sudah menggembirakan, meskipun demikian upaya-upaya perbaikan atau pencapaian target terus dilakukan antara lain:

- 1) Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis perangkat daerah dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pengelolaan arsip seperti pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip diserahkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur benar-benar arsip yang bernilai guna.
- 2) Memenuhi sarana prasarana penyimpanan Arsip Dinamis dan Record Center.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pagu anggaran PAPBD tahun 2023 seluruhnya telah ditetapkan sebesar Rp.56.968.756.167,- telah direalisasi sebesar Rp. 55.518.859.562,- atau 97,45% dengan perincian per program dan sasaran strategis dalam lampiran.

## **C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI**

Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP tahun 2023 yang tertuang dalam berita acara ada 4 (empat) hal diantaranya:

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur berhasil meningkatkan kualitas penerapan SAKIP dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja;
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur telah menunjukkan upaya perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan;
3. Penyusunan Dokumen perencanaan belum dilengkapi dengan penjelasan atau definisi operasional atas setiap Indikator Kinerja Utama (IKU);
4. Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur belum memenuhi kriteria penyajian informasi kinerja yang baik sesuai dengan sistematika pada PermenPANRB No.53 Tahun 2014.

Tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah memenuhi kekurangan sesuai berita acara dan melengkapi penjelasan atau definisi operasional atas setiap indikator yang digunakan dan formulasi perhitungan pada Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur akan menyesuaikan dengan yang ada. Dengan demikian penerapan SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur kedepan akan lebih baik lagi, indikator yang telah mencapai target tersebut adalah indikator-indikator yang membutuhkan komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen yang ada. Kendala dan permasalahan yang ada menjadi fokus perbaikan di masa mendatang.

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 yang menyajikan berbagai keberhasilan dan kendala dalam mencapai sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur secara umum menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Namun kedepan harus ditingkatkan lebih baik lagi indikator yang telah mencapai target tersebut adalah indikator-indikator yang membutuhkan komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen yang ada menjadi fokus perbaikan di masa mendatang.

Capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur secara umum dinyatakan “berhasil” karena 2 (dua) indikator kinerja capaiannya rata-rata 111,49%. Dengan melihat capaian diatas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dapat dikatakan memperoleh nilai “Sangat Baik”, diharapkan ke depan lebih baik dan lebih meningkat lagi.

Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur mendapat alokasi dana APBD Tahun 2023 seluruhnya Rp.56.968.756.167,- telah direalisasi sebesar Rp.55.518.859.562,- atau 97,45%.

### **PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN KINERJA**

Beberapa masalah yang masih menjadi perhatian bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur untuk tahun-tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Memacu peningkatan kegemaran membaca masyarakat lebih baik dan berharap dikemudian hari kegiatan membaca sudah menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa Timur.
2. Percepatan pembangunan dan pengembangan semua jenis Perpustakaan, baik Perpustakaan Umum, Sekolah, Instansi, Rumah Ibadah dan Perpustakaan Desa/Kelurahan di seluruh wilayah di Jawa Timur. Lebih jauh diharapkan lebih banyak Perpustakaan di wilayah Jawa Timur yang sudah terakreditasi baik.

3. Memacu penyelenggaraan tertib arsip di setiap Lembaga Organisasi Pemerintah terutama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan lebih jauh lagi tertib arsip sudah dilaksanakan BUMN/BUKD, Organisasi Sosial, Desa/Kelurahan sampai ke Rumah Tangga/Arsip Pribadi.
4. Masih belum terpenuhinya sarana dan prasarana kearsipan yang hampir disetiap Lembaga Pemerintah/Swasta (belum memiliki Depo yang representatif/sesuai standard Arsip Nasional RI).
5. Kurangnya kesadaran tentang pentingnya arsip bagi sebuah Lembaga/Organisasi.
6. Minimnya jumlah SDM Pustakawan/Arsiparis untuk Lembaga Perpustakaan dan Kearsipan di Jawa Timur.

### **STRATEGI PEMECAHAN MASALAH**

Terhadap kondisi tersebut strategi dimasa mendatang yang perlu dikembangkan adalah:

1. Sosialisasi, Penyuluhan pentingnya membaca, Pameran Buku dan Perpustakaan serta pembenahan dan perbaikan pelayanan perpustakaan, serta kegiatan lain yang memacu peningkatan minat dan kegemaran membaca perlu dilakukan lebih gencar.
2. Pendampingan untuk semua jenis Lembaga Perpustakaan menuju Perpustakaan yang terakreditasi baik di wilayah Jawa Timur.
3. Penanganan yang lebih serius terhadap penyelenggaraan Kearsipan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, diantaranya:
  - Menyelenggarakan Sosialisasi Kearsipan, Bimibingan Teknis bagi Perangkat Daerah, Pelatihan SDM, Seminar-Seminar tentang Tertib Arsip pada masyarakat luas
  - Pengawasan Arsip Internal dan Eksternal
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Arsip berdasarkan skala prioritas.
5. Bekerjasama dengan banyak Pihak/Stakeholder untuk mendorong dalam pelaksanaan penyelenggaraan semua jenis Perpustakaan dan Kearsipan.
6. Penambahan jumlah dan kapasitas SDM Pustakawan/Arsiparis melalui beberapa cara antara lain:

- Menambah formasi penerimaan calon ASN di Provinsi Jawa Timur khususnya jabatan fungsional Pustakawan/Arsiparis.
- Mengikuti Diklat Penciptaan Arsiparis/Pustakawan bagi staf di Instansi Pemerintah/Perangkat Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- Mengikutkan seminar baik Regional/Internasional, Workshop, Pendidikan dan Pelatihan Kefungsionalan, Studi Banding sampai dengan Magang pada Lembaga Perpustakaan dan Kearsipan yang lebih besar atau negara lain untuk menambah kapasitas bagi SDM Pustakawan dan Arsiparis.

Surabaya, 26 Januari 2024

KEPALA DINAS  
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
PROVINSI JAWA TIMUR



**HAY S. SUWARDI, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670402 199403 2 007



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. TIAT S. SUWARDI, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Jabatan : Gubernur Jawa Timur


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

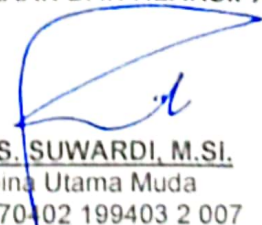
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 2 Januari 2023

Pihak Pertama,  
**KEPALA DINAS  
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

  
Pihak Kedua,  
**GUBERNUR JAWA TIMUR**  
  
**KHOFIFAH INDAR PARAWANSA**

  
**Ir. TIAT S. SUWARDI, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670402 199403 2 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Perspektif
1.	Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat Jawa Timur	1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Jawa Timur	15,4	Penerima Layanan
2.	Meningkatnya Sistem Tertib Administrasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	2. Presentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip	76 %	Penerima Layanan

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 47.867.332.762	APBD
2	Pembinaan Perpustakaan	Rp 2.987.181.774	APBD
3	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp 545.254.930	APBD
4	Pengelolaan Arsip	Rp 1.938.895.034	APBD
5	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp 282.213.500	APBD
6	Perijinan Penggunaan Arsip	Rp 111.177.000	APBD
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 53.732.055.000</b>	

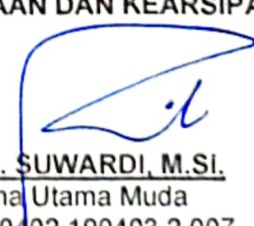
Pihak Kedua,  
**GUBERNUR JAWA TIMUR**



**KHOFIFAH INDAR PARAWANSA**

Surabaya, 2 Januari 2023

Pihak Pertama,  
**KEPALA DINAS**  
**PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**



**Ir. TIAT S. SUWARDI, M.Si.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19670402 199403 2 007





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (PERUBAHAN)  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. TIAT S. SUWARDI, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Jabatan : Gubernur Jawa Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
**GUBERNUR JAWA TIMUR**



**KHOFIFAH INDAR PARAWANSA**

Surabaya, November 2023  
Pihak Pertama,  
**KEPALA DINAS  
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**



**Ir. TIAT S. SUWARDI, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670402 199403 2 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (PERUBAHAN)**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Perspektif
1.	Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat Jawa Timur	1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	15,70	Penerima Layanan
2.	Meningkatnya Sistem Tertib Administrasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	2. Presentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip	76,00	Penerima Layanan

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 50.006.940.003	P-APBD
2	Pembinaan Perpustakaan	Rp 4.471.261.880	P-APBD
3	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp 635.241.750	P-APBD
4	Pengelolaan Arsip	Rp 1.493.425.934	P-APBD
5	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp 267.406.200	P-APBD
6	Perizinan Penggunaan Arsip	Rp 94.480.400	P-APBD
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 56.968.756.167</b>	

Surabaya, November 2023

Pihak Pertama,  
**KEPALA DINAS**  
**PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Pihak Kedua,  
**GUBERNUR JAWA TIMUR**



**KHOFIFAH INDAR PARAWANSA**

**Ir. TIAT S. SUWARDI, M.Si.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19670402 199403 2 007